

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan peristiwa sosial yang bersifat alamiah, bisa terjadi kapan dan di mana saja serta dapat dialami oleh siapa saja. Konflik timbul kaitannya dengan lingkungan sosial manusia. Sekolah sebagai lingkungan sosial juga tidak terlepas dari adanya konflik. Konflik di sekolah dapat ditimbulkan oleh proses belajar-mengajar yang tidak sehat maupun rapuhnya sistem manajemen sekolah. Fenomena konflik di lembaga pendidikan menurut Baedowi Mediasi Sekolah Damai (Retrieved (<https://mediaindonesia.com/opini/107484/mediasi-sekolah-damai> diakses 4 Maret 2018):

Secara sosial, mungkin wujud kekerasan yang terjadi di masyarakat kita adalah akibat dari puncak kegagalan institusi pendidikan dalam melakukan transmisi pendidikan secara damai dan adil. Secara pedagogis, mungkin sekolah kita tidak memiliki kontrol yang bisa diterapkan resolusi konflik sekaligus dapat melatih seluruh warga sekolah untuk membiasakan diri mengelola panduan konflik di sekolah melalui skema pembelajaran yang efektif.

Adanya konflik di sekolah dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar, mengurangi konsentrasi belajar yang berakibat pada turunnya prestasi siswa. Konflik di sekolah bisa berlangsung dalam berbagai gambaran, baik yang sifatnya individu ataupun kelompok.

Umumnya konflik di sekolah bersifat horizontal, seperti konflik yang kedudukan pelakunya sejajar, misalnya antara siswa dengan siswa, guru dengan guru. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Maftuh (2008, hlm. 23) yang mengatakan bahwa, “Umumnya konflik yang terjadi di kalangan pelajar adalah konflik horizontal yaitu konflik di kalangan pelajar sendiri.” Konflik adalah bentuk perselisihan antara dua orang atau lebih akibat kesalahpahaman atau ketidaksepakatan pada satu atau lebih pilihan.

Konflik di sekolah terjadi sejalan dengan meningkatnya kompleksitas persoalan pada siswa di sekolah, konflik ini terjadi karena adanya interaksi dengan teman dan lingkungan sosialnya. Konflik tersebut timbul karena perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan karakter, dan persaingan akademik. Konflik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan tenaga pendidikan lainnya di sekolah merupakan bentuk konflik yang bersifat interpersonal. Selain bersifat horizontal konflik di sekolah pada umumnya juga bersifat interpersonal, yaitu konflik antara satu individu dengan individu lainnya. DeVito (2011) “konflik *interpersonal* adalah konflik yang muncul ketika dua orang atau lebih merasa keinginannya saling bertentangan”. Banyak kasus perkelahian, *bullying*, tawuran dan tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh peserta didik dipicu oleh adanya konflik *interpersonal*, yaitu konflik di antara siswa yang tidak terselesaikan. Konflik yang belum terselesaikan biasanya merupakan penyebab timbulnya kekerasan. Penggunaan kekerasan dan tindakan agresif lainnya untuk menyelesaikan konflik telah lama menjadi pilihan akhir masyarakat, Weber and Haring (1998) bahwa,” dalam menuntaskan suatu konflik ada tiga cara yang biasa digunakan, yaitu bekerja sama, menyerang dan menghindar”. Itu berarti kita bisa memilih cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik, dengan mempertimbangkan dampak yang negatif yang akan timbul dari bentuk penyelesaian konflik tersebut.

Pemilihan penyelesaian konflik dapat mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya, jenis konflik, pihak yang berkonflik, berat atau ringannya konflik, dan nilai-nilai dan strategi resolusi konfliknya. Penyelesaian konflik dengan kekerasan tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, kalangan pelajar juga banyak yang menyelesaikan konfliknya dengan tindakan agresif. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan menyebutkan berbagai jenis tindak kekerasan yang biasa terjadi di sekolah umumnya berupa: penganiayaan, perundungan/*bullying*, pemerasan, perkelahian/tawuran, perpeloncoan, pelecehan, pemerkosaan, pencabulan, kekerasan berbasis (suku, ras, dan agama), dan kekerasan lain yang diatur undang-

undang. Kekerasan di kalangan pelajar biasanya menjadi cara terakhir untuk menyelesaikan konflik ketika semua cara yang bersifat konstruktif telah dilakukan tetapi tidak kunjung mampu menyelesaikan persoalan.

Kekerasan dan agresi di kalangan pelajar Indonesia angkanya setiap tahun terus meningkat. Ini terlihat dari data yang disampaikan oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (Ninis. <https://nasional.tempo.co/read/1084922/hari-pendidikan-kpai-84-persen-siswa-alami-kekerasan-di-sekolah> diakses 3 Maret 2018) berdasarkan pernyataan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyampaikan bahwa:

Kekerasan di sekolah dialami 84 persen anak di Indonesia. Kasus kekerasan di sekolah Indonesia mencapai angka tertinggi dibandingkan dengan Vietnam (79 persen) Nepal (79 persen), Kamboja (73 persen), dan Pakistan (43 persen). Di Indonesia 45 persen siswa laki-laki pernah mengalami tindak kekerasan oleh guru dan petugas sekolah, 40 persen siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman seumuran, 75 persen siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah, 22 persen siswa perempuan menyatakan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan dan 50 persen anak melaporkan mengalami perundungan (*bullying*) di sekolah.

Banyak kasus kekerasan di sekolah yang akhirnya menjadi peristiwa nasional karena melibatkan pihak berwajib dalam penyelesaiannya. Seperti kasus yang diberitakan oleh Kompas pada tanggal 1 bulan Desember 2017 berjudul Pinrang and Syamsuddin Gara-Gara Cubit Murid Yang Main HP, Seorang Guru Dilaporkan Ke Polisi.” *Kompas.Com* diakses 6 Maret 2018) Warta yang terjadi di SMA Negeri 3 Wajo Sulawesi Selatan, di mana Malayanti, Guru SMA Negeri 3 Wajo, Sulawesi Selatan diadukankan ke polisi karena dianggap telah mencubit muridnya pada 6 November. Peristiwa itu terjadi saat Milayanti memberikan materi dalam kelas kewirausahaan. Ia mengamati salah seorang siswa bermain telepon genggam. Malayanti memberi teguran kepada siswa tersebut untuk tidak bermain telepon genggam dengan mencubit lengannya. Siswa tersebut tidak menerima, selanjutnya mengadukannya ke Polres Wajo. Kemudian Kepolisian Resor Wajo melakukan menengahi untuk menangani perkara tersebut.”

Pemberitaan berikutnya dimuat pada tanggal 4 Agustus 2017 pada Sindonews.com berjudul "Tonapa, Tidak Terima Ditegur, Siswa SMP Aniaya Gurunya." *Sindonews.Com* diakses 7 Maret 2018) "Sebuah insiden dilaporkan di Mamuju Utara, di mana sekolah mengadu ke polisi karena tidak menerima teguran. Ferdinal (15) siswa kelas 9 SMPN 2 Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamugo Utara, Sulawesi Barat, tega menggebek gurunya dengan tongkat kayu yang mengakibatkan luka memar di tangan, punggung dan kepala guru tersebut sehingga harus dilarikan ke Puskesmas. Pihak sekolah mengadu ke polisi sektor Bambalamotu karena tindak pidana penganiayaan. Ferdinal ditahan di Kepolisian Sektor Bambalamotu atas aksinya tersebut.

Menyadari semakin maraknya dampak buruk yang ditimbulkan akibat konflik di kalangan pelajar, maka sudah saatnya sekolah sebagai lembaga pendidikan memberikan persiapan kepada siswa untuk dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapinya agar tidak berujung pada tindakan kekerasan.

Nilai-nilai dan strategi resolusi konflik adalah salah satu upaya untuk mempersiapkan siswa memiliki kemampuan menyelesaikan masalah secara konstruktif. Sebab belum ada lembaga pendidikan yang memiliki cara penyelesaian konflik dan persoalan kekerasan di sekolah secara terencana, bertahap, dan kompleks. Selama ini, cara penanganan konflik di sekolah umumnya dengan menindak siswa secara tegas mulai dari peringatan hingga sanksi. Padahal kemampuan untuk dapat menyelesaikan konflik yang dihadapi bagi para siswa menjadi sangat penting karena konflik yang tidak terselesaikan akan berakibat pada kekerasan dan pertikaian yang dapat menurunkan prestasi belajar siswa, serta hilangnya rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Siswa yang memiliki nilai-nilai dan strategi memecahkan konflik dengan baik akan memberi imbas yang baik pada relasi sosialnya. Sementara jika gagal melakukan pemecahan konflik, akan timbul resistensi dari lingkungan sosialnya karena dianggap melakukan perilaku yang negatif dan tidak lazim.

Mempelajari nilai-nilai dan strategi resolusi konflik merupakan bentuk dari usaha pendidikan dalam rangka menyiapkan peserta didik agar mampu menghadapi

dan menyelesaikan konflik. Maftuh (2008, hlm. 23) menyatakan bahwa pelajar sebagai generasi penerus diharapkan menjadi anak bangsa yang baik dan bertanggung jawab, salah satu tanggung jawab adalah kemampuan menyelesaikan persoalannya sendiri beserta persoalan lingkungan sosialnya. Persoalan sosial yang berhubungan dengan konflik diri mereka sendiri dan konflik di lingkungan sosialnya, memerlukan kemampuan untuk mengresolusi konflik tersebut. pengenalan konflik di Swedia mulai sebelum memasuki usia sekolah. Cekaite (2020) menyatakan bahwa “Sistem pendidikan di Swedia yaitu konflik yang dialami anak-anak merupakan sebuah kesempatan untuk belajar konflik dan bagaimana penanganannya serta menjaga harmoni social.”

Berdasarkan hal tersebut, nilai-nilai dan strategi resolusi konflik dijadikan sebagai sumber pembelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) karena Pendidikan IPS di Indonesia diharapkan mampu menjadi jagapati terdepan dalam membantu menyelesaikan masalah dan konflik yang terjadi di sekolah sebagai lembaga pendidikan. Untuk dapat nilai-nilai dan strategi penyelesaian konflik ke dalam pendidikan IPS, maka diperlukan kemampuan mengonstruksi dan menginternalisasi nilai-nilai dan strategi resolusi konflik ke dalam materi pembelajaran IPS di sekolah.

Konsep ini kemudian melahirkan pemikiran nilai-nilai dan strategi penyelesaian konflik sebagai sumber pembelajaran IPS dengan berbasis sosial budaya masyarakat setempat. Malihah (2011) menyimpulkan bahwa “Manusia selalu hidup dengan budayanya tetapi disisi lain tidak lepas dari konflik, kadangkala perbedaan budaya itu sebagai sumber konflik.” Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai dan strategi resolusi konflik berbasis budaya adalah jawabannya. Nilai-nilai dan strategi resolusi konflik berbasis budaya adalah sebuah sumber pembelajaran bagi peserta didik (siswa/mahasiswa) beserta masyarakat luas untuk bisa memahami budayanya dan budaya yang berbeda.

Perlunya penyelesaian konflik berpegang kepada kearifan budaya setempat atau kearifan lokal tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Bab II tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup pada Pasal 2, disebutkan bahwa penanganan konflik salah satu asasnya adalah kearifan lokal. Sementara itu dalam Bab III tentang pencegahan konflik, serta bagian keempat tentang meredam potensi konflik, pada pasal 9 dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal.

Yang dimaksud melalui “asas kearifan lokal” yaitu penanganan konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat. Selain regulasi-regulasi penanganan konflik juga didukung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (2015) tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Usaha melibatkan kearifan lokal untuk menangani konflik menurut peraturan menteri ini tertuang pada Bab VIII tentang Peran Serta Masyarakat pada pasal 22 ayat 4 poin a dan b yaitu pranata adat dan pranata sosial masyarakat setempat. Merujuk pada undang-undang di atas maka nilai-nilai lokal menjadi pijakan awal bagi pengembangan nilai-nilai dan strategi resolusi konflik di sekolah.

Pembelajaran menyelesaikan konflik di sekolah-sekolah masih dalam paradigma pelaku dan korban, jahat dan baik, benar dan salah, memulai dan membala lalu diberikan sangsi mulai teguran, surat peringatan, pemanggilan orang tua dan pemberhentian siswa. Persoalan konflik siswa dengan siswa dan konflik siswa dengan guru diselesaikan oleh guru bimbingan konseling dan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan.

Proses penyelesaiannya dengan memanggil pihak-pihak yang berkonflik untuk menerangkan kronologis kejadian, setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berkonflik maka yang bersalah diharapkan dapat meminta maaf. Guru bimbingan penyuluhan (BK) atau wakil kepala sekolah bagian kesiswaan berperan sebagai mediator yang tujuannya mendamaikan lalu diakhiri dengan nasehat. Ketika terjadi konflik guru dan siswa peran guru BK dan wakil kepala sekolah

bagian kesiswaan berfungsi sebagai pemberi nasehat sekaligus hakim dalam menentukan hukuman yang akan diberikan kepada siswa. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, institusi pendidikan mempunyai banyak pilihan sebagai nilai-nilai dan strategi resolusi konflik karena Indonesia kaya dengan ragam budayanya salah satu pilihannya adalah berbasis budaya Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau memandang kekerasan sebagai sesuatu hal yang rendah karena sejarah berdirinya Minangkabau diawali dari kekuatan pikiran bukan kekuatan fisik, Hadler (2010, hlm. 23) menyatakan bahwa “Asal usul nama Minangkabau didasarkan pada cerita tentang peperangan fisik tentara menjadi pertarungan yang diwakili oleh dua ekor kerbau berkat kemampuan negosiasi.”

Awalnya kedatangan pasukan Majapahit adalah untuk menaklukan Pulau Sumatera termasuk Pariangan (sebelum menjadi Minangkabau), dalam hikayat tersebut disampaikan bahwa Pasukan Majapahit berjumlah ratusan ribu yang terdiri pasukan mulai dari patih dan pasukan yaitu pasukan panah, pasukan pedang dan pasukan tombak serta ditambah seekor yang sangat besar. Lalu dua orang yang dikenal sebagai pendiri Minangkabau Patih Suatang (Datuak Parpatiah Nan Sabatang) dan Patih Ketemanggungan (Datuak Katamanggungan) perwakilan Pariangan menegosiasi pertempuran dari peperangan fisik menjadi pertarungan dua ekor kerbau kepada fihak Majapahit. Pihak Majapahit memiliki kerbau yang sangat besar maka dari itu pihak Majapahit langsung menyetujuinya dengan kesepakatan bahwa kerbau siapa yang menang maka dia adalah pemenang perang.

Akhirnya diadulah kerbau Majapahit dengan kerbau Pariangan yang dimenangkan oleh kerbau Pariangan dan berakhirlah emperium Majapahit ke Sumatera. Sejak kemenangan adu kerbau maka Pariangan lambat laun berubah menang kerbau akhirnya menjadi Minangkabau, sehingga masyarakat Minangkabau sangat bangga dengan adat istiadat dan budayanya yang dianggap maju, demokrasi, anti kekerasan, serta mampu melahirkan intelektual-intelektual dan pemimpin-pemimpin terkemuka Indonesia yang pada awal abad ke-20 memainkan kapasitas utama dalam pergerakan nasional dan pergerakan Islam.

Mereka lahir bukan dari pendidikan yang penuh kekerasan, akan tetapi lahir dari pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, adat istiadat, demokrasi anti kekerasan. Begitu besar jasa dan pengaruh tokoh Minangkabau ini, maka sudah tepat kiranya nama-nama jalan protokol di Indonesia diambil dari nama-nama tokoh-tokoh Minangkabau tersebut untuk mengenang jasanya dan menghormati serta mengabadikan karya-karyanya. Nama-nama jalan tersebut seperti: Haji Agus Salim, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Muhammad Natsir, Hamka, Sutan Sjahrir, Rasuna Said, dan Tan Malaka.

Pilihan terhadap budaya Minangkabau sebagai nilai-nilai dan strategi resolusi konflik dikarenakan, *pertama* nilai-nilai dan strategi resolusi konflik telah mereka ajarkan sejak dulu di lingkungan keluarga sehingga konsep-konsep idealnya berkaitan dengan konteks sosial masyarakat dan kesehariannya; *kedua* nilai-nilai dan strategi resolusi konflik yang ditawarkan melalui budaya Minangkabau tujuan utamanya bukan saja menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menyelesaikan konflik akan tetapi yang terpenting adalah setelah konflik diselesaikan yaitu tetap terjaganya silaturahmi dan rasa kekeluargaan, seperti yang terungkap dalam pepatah *sarupo mailo rambuik dalam tapuang, rambuik ndak putuih tapuang ndak baserak* (seperti menarik rambut dalam tepung, rambut tertarik dengan sempurna, yang artinya rambut tidak putus dan tepung tidak berserakan); *ketiga* budaya Minangkabau adalah salah satu budaya yang menerapkan cara penyelesaian konflik dengan menggunakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kearifan adat yang otentik; *keempat* penelitian tentang nilai-nilai dan strategi resolusi konflik berbasis budaya Minangkabau kompleks belum pernah dilakukan. *Kelima* adanya nilai keyakinan masyarakat dalam menyelesaikan konflik seperti dalam pepatah yang berbunyi:

*Tak ado karuah nan tak janiah
Tak ado kusuik nan tak salasai
Sapueh silang jo salisiah
Dapek bana tibolah damai*

Tak ada keruh tak jernih
Tak ada kusut yang tidak selesai

Setelah bosan bersilang dengan berselisih
Mendapatkan kebenaran datanglah perdamaian
Kepercayaan orang Minang yang berkeyakinan bahwa tidak suatu permasalahan yang tidak jalan keluarnya dan setiap konflik atau perselisihan akan berdamai pada akhirnya. Kepercayaan inilah yang pada akhirnya berkembang sehingga tercipta sebagai sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran yang diuraikan disini adalah sumber pembelajaran IPS yang berpedoman pada nilai-nilai dan strategi resolusi Adat Minangkabau.

B. Identifikasi Masalah

Untuk dapat memastikan bagaimana nilai-nilai dan strategi resolusi konflik berbasis budaya lokal sebagai sumber belajar pendidikan IPS di sekolah, maka terlebih dahulu perlu intruduksi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan setting sosial budaya masyarakat setempat, norma-norma yang berlaku di sekolah dan cita-cita masyarakat serta arah konseptual pendidikan di sekolah. Bagaimana cita-cita itu memberikan warna kemajuan pendidikan di sekolah, beserta hasil-hasil yang timbulkan.

Oleh karena itu, identifikasi masalah penelitian ini harus diperhatikan dengan nisi sebagai berikut: *pertama*, akan digali terlebih dahulu konteks sosial budaya masyarakat Minangkabau yang menjadi dasar nilai-nilai dan strategi resolusi konflik sebagai sumber pembelajaran IPS di sekolah; *kedua*, pembudayaan nilai-nilai sosial budaya Minangkabau dalam nilai-nilai dan strategi resolusi konflik di sekolah; *ketiga*, pengembangan nilai-nilai dan strategi resolusi konflik berbasis budaya Minangkabau

yang menjadi bagian sumber pembelajaran pendidikan IPS di sekolah. Berikut diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan identifikasi masalah penelitian sebagai berikut.

1. Konteks Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau Sebagai Dasar Nilai-Nilai dan Strategi Resolusi Konflik.

Kehidupan masyarakat sekolah dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya di mana masyarakat sekolah tersebut berada.

Namun demikian dalam membangun dan menciptakan suasana aman dan nyaman di sekolah umumnya lepas dari kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

Jika berlandaskan pada pemikiran dan pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan adalah proses sosial budaya, maka sudah seharunya pendidikan di sekolah dikembalikan pada struktur sosial dan budaya di mana masyarakat tersebut berada, sehingga sekolah dapat menjadi cerminan struktur sosial dan budaya masyarakat tersebut. Tidak dilibatkannya nilai-nilai sosial dan budaya setempat dalam struktur pembelajaran di sekolah dapat berakibat pada banyak permasalahan dan konflik di sekolah yang tidak terselesaikan dan berujung pada kekerasan.

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah dan konflik di sekolah. Sekolah dapat menyesuaikan dan mengambil nilai-nilai sosial dan strategi resolusi konflik dengan budaya Minangkabau untuk membantu menyelesaikan masalah dan konflik di sekolah. Nilai-nilai sosial dan budaya tersebut dapat diadopsi atau diinternalisasikan ke dalam kurikulum sebagai sumber pembelajaran, sehingga secara langsung proses pembelajaran di sekolah sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

Oleh karenanya, menjadi penting untuk mengetahui nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Hal ini dimaksudkan agar sekolah dapat memberikan pengetahuan dan mananamkan ketrampilan kepada masyarakat sekolah tentang bagaimana menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai budaya

Minangkabau. Penyelesaian konflik di sekolah dengan bertumpu pada identitas sosial budaya Minangkabau menjadi salah satu cara untuk mengembalikan anak bangsa kembali ke akar budayanya sekaligus bertujuan memajukan budaya nasional.

2. Nilai Nilai dan Strategi Resolusi Konflik pada Adat Minangkabau sebagai Sumber Pembelajaran IPS dalam Rangka Membangun Generasi Muda Minangkabau yang Mampu Menyelesaikan Konflik di Indonesia Umumnya dan Sumatera Barat Khususnya

Meyakini pandangan bahwa pendidikan adalah proses sosial dan budaya, maka memahami nilai-nilai dan strategi resolusi konflik yang berbasis kearifan lokal Minangkabau dianggap mampu mengembalikan pemahaman generasi muda Minangkabau pada akar sosial budaya mereka sendiri agar generasi muda tidak tercerabut dari akarnya.

Nilai-nilai dan strategi resolusi konflik berbasis budaya Minangkabau bukan saja sebagai proses penyelesaian konflik tetapi sekaligus membentuk identitas Minangkabau, karena dalam tahap awal pembelajarannya yang pertama dilakukan adalah memamahi nilai-nilai budaya Minangkabau atau cara pandang Minangkabau, setelah cara pandang atau pemahamannya didapatkan baru strategi penyelesaiannya bisa dilakukan.

Cara pandang Minangkabau diucapkan disetiap kata sambutan mulai pejabat dan calon pejabat sampai sambutan acara formal dan nonformal cara pandang tersebut adalah adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabbulah tetapi hilang dalam realitas. Nilai-nilai dan strategi resolusi konflik berbasis budaya Minangkabau mengembalikan konsep ideal dengan realitas. Sehingga slogan adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabbulah bukan lagi angan-angan semata tetapi membuat bertemu ruas dengan buku atau bertemu konsep dengan kenyataan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dijelaskan dalam beberapa pokok permasalahan sebagai berikut.

- 1) Bagaimana nilai-nilai resolusi konflik berbasis nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat masyarakat Nagari Sisawah?
- 2) Bagaimana strategi resolusi konflik pada masyarakat Nagari Sisawah?
- 3) Mengapa nilai nilai dan strategi resolusi konflik pada adat Nagari Sisawah sebagai sumber pembelajaran IPS?

D. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian adalah pengembangan keilmuan diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan baru dalam mengembangkan pembelajaran IPS di Indonesia.

Mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan di atas, hasil penelitian perlu diperoleh melalui pencapaian tujuan-tujuan, yaitu untuk:

- 1) menganalisis dan mendeskripsikan nilai-nilai resolusi konflik berbasis nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat masyarakat Nagari Sisawah.
- 2) menganalisis dan mendeskripsikan strategi resolusi konflik pada masyarakat Nagari Sisawah.
- 3) menganalisis dan menjabarkan nilai nilai dan strategi resolusi konflik pada adat Nagari Sisawah sebagai sumber pembelajaran IPS.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik secara praktis maupun teoritis sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian adalah pengembangan nilai-nilai dan strategi resolusi konflik berbasis adat Minangkabau khususnya, dan diharapkan mampu memberikan pengetahuan, visi dan misi baru dalam mengembangkan pembelajaran IPS di Indonesia, yang selama ini cenderung hanya didefinisikan, dimaknai, diimplementasikan, serta terfokus pada upaya sosialisasi ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang disempitkan untuk tujuan pendidikan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu bagi penelitian dalam bidang pendidikan selanjutnya, khususnya pendidikan IPS untuk memberikan kontribusi terhadap temuan konsep, proporsi, dan generalisasi yang dapat digunakan sebagai renungan awal untuk menemukan persoalan-persoalan baru yang berhubungan dengan konteks sosial budaya dan pelaksanaan desain pendidikan di sekolah, khususnya pendidikan IPS di Indonesia dalam pencapaian visi dan misi, dengan tujuan mengembangkan kemampuan berwawasan yang mendunia dengan identitas lokal.

2. Segi Praktis

- a. Bagi sekolah sebagai pedoman pertimbangan dalam menyusun desain pembelajaran serta menentukan sumber, metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan nilai-nilai dan strategi resolusi konflik berbasis adat Minangkabau di Sumatera Barat.
- b. Bagi siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung tentang nilai-nilai dan strategi resolusi konflik sehingga mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari.

3. Pengambil Kebijakan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengambil kebijakan dan para pendidik di Sumatera Barat untuk mengembangkan kurikulum dan program pembelajaran yang berbasis budaya masyarakat, sebagai daya tahan budaya lokal terhadap perubahan sosial budaya masyarakat.

F. Struktur Organisasi Penelitian

Secara keseluruhan disertasi ini terdiri dari lima (5) bagian atau bab, yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menyajikan deskripsi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi disertasi

BAB II Kajian Pustaka

Memuat kajian konseptual dan teoritis tentang: (1) kajian tentang nilai-nilai dan strategi resolusi konflik, (2) nilai-nilai dan strategi resolusi konflik sebagai sumber pembelajaran IPS. Pada bagian ini disajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan nilai-nilai dan strategi resolusi konflik. Pada segmen ini juga menjelaskan hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan garis besar pengembangan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Memuat lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian dan prosedur penelitian, metode pengumpulan data, jenis data penelitian yang dikumpulkan, metode pengumpulan data yang digunakan, dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Meliputi seting sosial budaya masyarakat, termasuk keyakinan masyarakat yang merupakan rekonstruksi pengalaman budaya para civitas pendidikan

turut memberi andil praktik nilai-nilai dan strategi resolusi konflik dalam masyarakat Nagari Sisawah, dan menjadi sumber pembelajaran IPS

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diajukan untuk ditindak lanjuti oleh stakeholder terkait, antar lain para pengambil kebijakan dan pegiat serta peneliti selanjutnya.

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang sering menimbulkan konflik di sekolah, maka sudah saatnya guru dan manajemen sekolah mempertimbangkan untuk memasukkan kearifan lokal dalam kurikulum sebagai resolusi konflik di sekolah. Nilai-nilai kearifan lokal Indonesia dapat menjadi upaya penyelesaian konflik yang banyak di sekolah.